

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkarayang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan

	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$ Catatan: • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	1. Laporan Semesteran 2. Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi		Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan		Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan

	Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$		1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
3.	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			Panitera	
	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$ Catatan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilum, Badilag, BadilmilTUN	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan		$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilum, Badilag, BadilmilTUN	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan

	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan _____ x 100 Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan Catatan: • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama I Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Serna 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum _____ x 100 Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu Catatan: • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti _____ x 100 Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan